

PROSPEKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN EUTHANASIA PADA PELAYANAN PALIATIF

ARLIS KARLINA

Abstrak

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit terminal atau tidak dapat disembuhkan dengan cara yang bermartabat dan tanpa rasa sakit. Tindakan ini masih menjadi kontroversi di banyak negara, termasuk Indonesia, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan hukum. Dokter yang melaksanakan euthanasia berisiko mendapat sanksi hukum, baik pidana maupun perdata, karena dianggap melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Namun, di sisi lain, dokter juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengurangi penderitaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan tindakan euthanasia pada pelayanan paliatif. Pelayanan paliatif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi euthanasia dalam perawatan paliatif dan menganalisis prospektif pengaturan perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan tindakan euthanasia dalam perawatan paliatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan tindakan euthanasia pada pelayanan paliatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: merevisi undang-undang kesehatan dan kode etik kedokteran untuk mengakomodasi prinsip otonomi pasien dan dokter; membuat regulasi khusus tentang syarat, prosedur, dan pengawasan euthanasia; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab pasien dan dokter terkait euthanasia; serta meningkatkan kerjasama antara dokter, pasien, keluarga, tim paliatif, dan otoritas hukum dalam mengambil keputusan tentang euthanasia.

Kata Kunci: Euthanasia, Paliatif, Perlindungan Hukum.

PROSPECTS OF LEGAL PROTECTION POLICIES FOR DOCTORS IN IMPLEMENTING EUTHANASIA IN PALIATIVE SERVICES

ARLIS KARLINA

Abstract

Euthanasia is the act of ending the life of a person suffering from a terminal or incurable disease in a dignified and painless manner. This action is still controversial in many countries, including Indonesia, because it is contrary to religious, moral, and legal values. Doctors who carry out euthanasia run the risk of receiving legal sanctions, both criminal and civil, because they are considered to have committed murder or abuse. However, on the other hand, doctors also have an obligation to respect the patient's right to self-determination and reduce suffering. Therefore, a legal protection policy is needed for doctors carrying out euthanasia actions in palliative care. Palliative services are health services that aim to improve the quality of life of patients and their families who face problems related to life-threatening illnesses. This study aims to analyse the implementation of euthanasia in palliative care and prospective legal protection arrangements for doctors who perform euthanasia in palliative care. This study uses a normative juridical method with a statutory and comparative approach. The results of the study show that the policy of legal protection for doctors who perform euthanasia in palliative care can be carried out in several ways. These include: changing the health law and medical code of ethics to fit the principle of patient and doctor autonomy; making special rules about the terms, procedures, and supervision of euthanasia; and educating the public about the rights and responsibilities of patients and doctors.

Keywords: Euthanasia, Palliative, Legal Protection.